

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2022



**LAPAS PEREMPUAN KELAS
III PANGKALPINANG)**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberi informasi secara rinci capaian apa yang telah didapatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik secara capaian maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Pangkalpinang, 31 Desember 2022
Kepala Lapas Perempuan


Hari Anggraeni
NIP 198210092000122001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Laporan Kinerja ini merupakan tahap awal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan LKjIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan Sasaran Program Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
	C. Maksud dan Tujuan	6
	D. Aspek Strategis	7
	E. Sistematika Laporan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	13
	B. Perjanjian Kinerja	14
	C. Alokasi Anggaran	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	19
	B. Realisasi Anggaran	43
	C. Capaian Kinerja Anggaran	45
	D. Capaian Kinerja Lainnya	46
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
Tabel 2.2	: Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022	14
Tabel 2.3	: Rincian Anggaran	15
Tabel 3.1	: Daftar Nama Instansi yang Bekerjasama	30
Tabel 3.2	: Pelayanan Kesehatan WBP	32
Tabel 3.3	: Jumlah WBP Ikut Pelatihan	35
Tabel 3.4	: Daftar Dokumen Laporan Penggeledahan	35
Tabel 3.5	: Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	38
Tabel 3.6	: Realisasi Anggaran	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	51
Lampiran II	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguhsungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berada di naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di ***Jalan Sanggul Dewa Kel. Batin tikal Kec. Tamansari***, mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2017, berdasarkan Naskah Serah Terima WBP dari Lapas Pangkalpinang ke Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Nomor : W.7.PAS.1 KP.04.01- 391 tanggal 1 Maret 2017. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang sebagai Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas dalam bidang yang bersifat substantive (pembinaan, Registrasi, Keamanan) namun juga bertugas di bidang Fasilitatif (Tata Usaha) dimana untuk pelaporan setiap bulannya dituntut menggunakan IT (Informasi Teknologi) yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian Laporan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI serta pemberian informasi pelayanan publik secara akurat.

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang pola bangunan Unit pelaksana teknis Pemasyarakatan adalah sebanyak 135 Orang. Dengan keadaan per 26 November 2022 Jumlah Penghuni sebanyak 105 Orang dengan Rincian sebagai berikut :

1. Narapidana : 89 Orang
2. Tahanan : 16 Orang

Melihat data diatas antara kapasitas hunian dengan jumlah penghuni, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang tidak mengalami over kapasitas.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan untuk menunjang perkembangan pembangunan Hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana /Anak Didik dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana / Anak Didik
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana / Anak Didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas.
5. Melakukan urusan Tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang bersifat Substantif dan Fasilitatif :

1. Tugas Substantif merupakan tugas teknis yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Tugas Fasilitatif meliputi urusan rumah tangga, administrasi dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan.

Program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berupa situasi keamanan yang terkendali tetapi juga harus berupa Pembinaan mental, sosial Narapidana sesuai dengan bunyi pasal 2 UU RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa system Pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah batas dan cara pembinaan Narapidana yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan di lembaga Pemasyarakatan haruslah berdasarkan sistem Pemasyarakatan yang berasumsi bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga mereka perlu di bimbing agar menyadari kesalahannya dan di bina menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sesuai dengan sepuluh prinsip Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mempunyai beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Sub Seksi Bagian Tata Usaha

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

➤ Sub Seksi Pembinaan

Memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada WBP, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi WBP, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.

➤ Sub Seksi Admisi dan Orientasi

Bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.

➤ Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

STRUKTUR ORGANISASI



Keadaan pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang per 31 Desember 2022 berjumlah 67 Orang dengan rincian dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
 - Pegawai Wanita : 52 Orang
 - Pegawai Pria : 15 Orang
- Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan :
 - Golongan I : -
 - Golongan II : 60 Orang
 - Golongan III : 06 Orang
 - Golongan IV : 01 Orang
- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :
 - SD : -
 - SMP : -
 - SMA : 62 Orang
 - D III : -
 - S 1 : 04 Orang
 - S 2 : 01 Orang
- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia :
 - 0 - 20 Tahun : -
 - 21 - 30 Tahun : 54 Orang
 - 31 - 40 Tahun : 12 Orang
 - 41 - 50 Tahun : 01 Orang
 - 51 - 55 Tahun : -

LETAK GEOGRAFIS

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang terletak di Jalan Sanggul Dewa Kel. Batintikal Kec. Tamansari Pangkalpinang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Barat	LPKA Kelas II Pangkalpinang
Timur	RUMAH DINAS PT TIMAH
Utara	TRANSMART
Selatan	RUMAH DINAS KALAPAS

C. MAKSUD DAN TUJUAN

LKJip Tahun 2022 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dibuat untuk dapat mengukur sejauh mana Rencana Kerja sudah dilakukan, Capaian Kinerja apa saja yang sudah tercapai serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Capaian Kinerja. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi mengenai Rencana Kerja yang sudah dilaksanakan, Capaian Kinerja yang sudah tercapai serta Kendala Apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Capaian Kinerja serta Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Perempuan satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya dan Capaian Kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang menjadi penting karena keberhasilan program pembinaan Bagi Warga Binaan Perempuan tergantung dari Kinerja yang dilakukan dan upaya apa untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan Capaian Kinerja.

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020-2024, antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran Hukum Warga binaan pemasarakatan dan tahanan

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemasyarakatan
3. Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang pemasyarakatan
4. Meningkatnya produktifitas Warga binaan pemasyaraktan menuju manusia mandiri yang berdaya guna
5. Peningkatan Akuntabilitas

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, yaitu :

1. Indikator/ukuran keberhasilan dalam Renstra Kementerian/Lembaga dengan indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
2. Dalam penyusunan perencanaan tahun yang akan datang, terdapat kebijakan dan prioritas baru yang berbeda dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sehingga hasil evaluasi belum dapat direalisasikan sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan tahun mendatang;
3. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang tugas, namun dilakukannya optimalisasi dari SDM yang ada;
4. Kebutuhan BMN yang belum memenuhi standar kebutuhan;
5. Keterbatasan lahan/tempat untuk kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang Keamanan dan Ketertiban;

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2021 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN : menguraikan mengenai Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis, dan Sistematika Laporan;
- BAB II PERENCANAAN KINERJA : menguraikan mengenai Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : menguraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran, dan Capaian Kinerja Lainnya pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
- BAB IV PENUTUP : menguraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, dan saran Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

- BAB IV PENUTUP : menguraikan mengenai simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2022 dan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran kerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Pelaksanaan tugas mengacu dan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemasyarakatan.

Visi

" Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profesional dalam penegakan Hukum dan Perlindungan HAM".

Misi

- Melaksanakan Pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasyarakatan.
- Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

- Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

Tujuan

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasyarakatan
- Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
- Terwujudnya sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan
- Terwujudnya Reintegrasi sosial WBP secara sehat dan hidup, kehidupan dan penghidupan
- Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan
- Terwujudnya Keamanan dan ketertiban
- Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
- Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi

B. PERJANJIAN KINERJA

**Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

--	--	--	--

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%

	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
		2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%		
3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%		
4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%		
5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%		
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%		

		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

C. ALOKASI ANGGARAN

TABEL 2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2022

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.454.005.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.454.005.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.807.920.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.807.920.000

TABEL 2.3
RINCIAN ANGGARAN

No	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Rp 3,037,835,000	Rp 2,483,246,000	Rp 135,900,000	Rp 5,656,981,000

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan core value ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yaitu :

1. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM;
4. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM.
6. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp5,656,981,000 (lima milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi E-performance.

Secara umum sampai dengan Desember 2022, pencapaian Sasaran Program Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang sudah tercapai, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

1. Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Target 2022 : 75 %

Capaian : = $\frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$
 = $\frac{100}{75} \times 100\%$
 = 133,33 %

Keterangan : Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **133,33%** dari target 75%.

2. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Target 2022 : 93 %

Capaian : = $\frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$
 = $\frac{100}{93} \times 100\%$
 = 107,53%

Keterangan : Capaian Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **107,53%** dari target 93%.

3. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Target 2022 : 96 %

Capaian : = $\frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$
 = $\frac{100}{96} \times 100\%$
 = 104,17 %

Keterangan : Capaian Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **104,17%** dari target 96%.

4. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Target 2022 : 70 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{70} \times 100 \% \\ &= 142,86 \%\end{aligned}$$

Keterangan : Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **142,86%** dari target 70%.

5. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target 2022 : 80 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% \\ &= 125 \%\end{aligned}$$

Keterangan : Capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **125%** dari target 80%.

6. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target 2022 : 80 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% \\ &= 125 \%\end{aligned}$$

Keterangan : Capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **125%** dari target 80%.

7. Indikator Kinerja : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Target 2022 : 70 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{70} \times 100 \% \\ &= 142,86 \%\end{aligned}$$

Keterangan : Capaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) sesuai standar pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **125%** dari target 80%.

8. Indikator Kinerja : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Target 2022 : 25 %

Capaian : 0

Keterangan : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengikuti program Rehabilitasi Narkoba **0%** karena di LPP Kelas III Pangkalpinang tidak ada program rehabilitasi

Sasaran Kegiatan

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

1. Indikator Kinerja : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Target 2022 : 65 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{65} \times 100 \%\end{aligned}$$

$$= 153,85 \%$$

Keterangan : Capaian Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **153,85%** dari target 65%.

2. Indikator Kinerja : persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Target 2022 : 98 %

$$\text{Capaian} : = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{93} \times 100 \%$$

$$= 102,04\%$$

Keterangan : Capaian Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **102,04%** dari target 98%.

3. Indikator Kinerja : persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Target 2022 : 80 %

$$\text{Capaian} : = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$= 125 \%$$

Keterangan : Capaian Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **125%** dari target 80%.

4. Indikator Kinerja : persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Target 2022 : 80 %

$$\text{Capaian} : = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$= 125 \%$$

Keterangan : Capaian Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan pada tahun 2022 telah tercapai sebesar **125%** dari target 80%.

5. Indikator Kinerja : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Target 2022 : 15 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{70} \times 100 \% \\ &= 0 \%\end{aligned}$$

Keterangan : Jumlah 0 yang dimaksud dikarenakan tidak adanya Narapidana resiko pada tahun 2022

6. Indikator Kinerja : Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Target 2022 : 28 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{28} \times 100 \% \\ &= 357,14 \%\end{aligned}$$

Keterangan : Capaian Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi telah tercapai sebesar **357,14%** dari target 28%.

7. Indikator Kinerja : Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Target 2022 : 67 %

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &: = \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{67} \times 100 \% \\ &= 149,25 \%\end{aligned}$$

Keterangan : Capaian Persentase Persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah tercapai sebesar **149,25%** dari target 67%.

Sasaran Kegiatan

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Target 2022 : 80 %

Capaian : $= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$= 125 \%$$

Keterangan : Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah tercapai sebesar **125%** dari target 80%

2. Indikator Kinerja : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Target 2022 : 70 %

Capaian : $= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100}{70} \times 100 \%$$

$$= 142,86\%$$

Keterangan : Capaian Persentase Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah tercapai sebesar **142,86%** dari target 70%.

3. Indikator Kinerja : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Target 2022 : 80 %

Capaian : $= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$= 125 \%$$

Keterangan : Capaian Persentase Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tercapai sebesar **125%** dari target 80%.

4. Indikator Kinerja : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Target 2022 : 70 %

Capaian : $= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\%$
 $= \frac{100}{70} \times 100 \%$
 $= 142,86 \%$

Keterangan : Capaian Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tercapai sebesar **142,86%** dari target 70%.

Sasaran Kegiatan

4. Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

2. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

3. Indikator Kinerja : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai

pemasyarakatan

4. Indikator Kinerja : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

5. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Perkantoran

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Terlaksananya Layanan Perkantoran

Sasaran Program 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas

Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan selain dapat dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan. Survey dilakukan terhadap pengunjung baik keluarga Warga Binaan maupun tamu yang mengunjungi Lapas Perempuan

Periode Januari 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Januari 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,44/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 31 Orang

Periode Februari 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Februari 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 32 Orang

Periode Maret 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Maret 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 32 Orang

Periode April 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode April 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 31 Orang

Periode Mei 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Mei 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 32 Orang

Periode Juni 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Juni 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 30 Orang

Periode Juli 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Juli 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 32 Orang

Periode Agustus 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Agustus 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 31 Orang

Periode September 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode September 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 36 Orang

Periode Oktober 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Oktober 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 30 Orang

Periode November 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode November 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



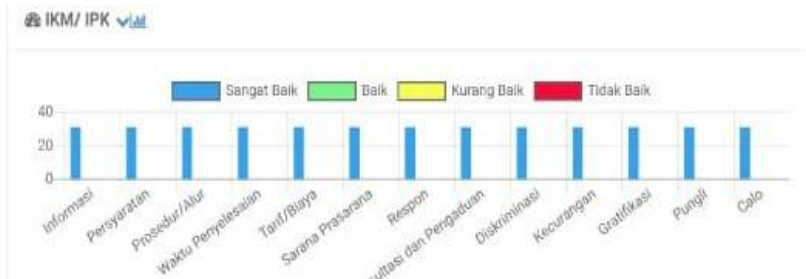
Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 31 Orang

Periode Desember 2022

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode November 2022 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 17,50/17,50 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 31 Orang

Realisasi Tahun 2022 =

Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan Selain dapat dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemsarakatan. Survey dilakukan terhadap pengunjung baik keluarga Warga Binaan maupun tamu yang mengunjungi Lapas Perempuan. Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan ini juga dapat dinilai dari instansi yang melakukan kerjasama.

Tabel 3.1

DAFTAR NAMA INSTANSI YANG MELAKUKAN KERJASAMA

NO	NAMA INSTANSI / PIHAK KETIGA	RUANG LINGKUP KERJASAMA
1	PUSKEMAS TAMANSARI	Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemsarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan

		rehabilitative
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG	-Layanan Perpustakaan Keliling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang -Layanan pinjam pakai buku perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
3	POLRES KOTA PANGKALPINANG	Kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pangkalpinang terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mengenai koordinasi dalam hal pengawalan warga binaan pemasyarakatan
4	KODIM 0413 BANGKA	Kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kodim 0413 Bangka terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mengenai koordinasi dalam hal pengawalan warga binaan pemasyarakatan
5	WADO HEALTH CARE FOUNDATION	Memberikan pelayanan dan pembimbingan kepada klien perempuan dan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang berupa : Pendampingan, assesmen, konseling, terapi, pembinaan dan penyuluhan, keahlian dalam bidang olahraga dan seni serta keterampilan
6	LPH dan HAM Pancasila	Pelayanan Pos Bankum, pemberian bantuan hukum
7	Yayasan As-Sholehah	Pendidikan dan pembinaan Kepribadian bagi WBP
8	DINAS DUKCAPIL	Memberikan dan membantu pelayanan kependudukan bagi WBP
9	RSUD DEPATI HAMZAH	Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan

		rehabilitative
10	DINAS TENAGA KERJA PROV KEP BANGKA BELITUNG	Memberikan dan membantu penyaluran keahlian WBP
11	KEMENTERIAN AGAMA KOTA	Pendidikan dan pembinaan Kepribadian bagi WBP
12	AY CHING SALON	Pendidikan dan pembinaan Kemandirian bagi WBP dibidang salon dan nail art
13	BATIK MELAYU PINANG SIRIH	Pendidikan dan pembinaan Kemandirian bagi WBP dibidang batik Shibori

Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah dilaksanakan secara baik bekerja sama dengan Puskesmas Taman dari dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pelayanan Kesehatan WBP

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KEGIATAN
1	06 Januari 2022	Pengawasan WBP Melahirkan an Wiliandari Ke RSUP Soekarno
2	13 Januari 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
3	17 Januari 2022	Vaksin booster dari Puskesmas Taman sari
4	20 Januari 2022	Pengawasan WBP Kontrol Pasca Melahirkan an. Wiliandari Ke RSUP Soekarno
5	3 Februari 2022	Pemeriksaan PCR dari Puskesmas Taman Sari
6	3 Februari 2022	Pengawasan WBP an. Siswanti Apriani ke RSUD Depati Hamzah
7	8 Februari 2022	Pengawasan WBP Melahirkan An. Rani Citradewi Ke RSUD Depati Hamzah
8	11 Februari 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
9	20 Februari 2022	Pengawasan WBP an. Suryani Apriani ke RSUD

		Depati Hamzah
10	07 Maret 2022	Kegiatan Vaksinasi dari Rumkit Ban Pangkalpinang
11	10 Maret 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
12	21 Maret 2022	Pemeriksaan IVA test dari Puskesmas Taman sari
	02 April 2022	Cek Urine CPNS dari Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
13	08 April 2022	Pengawasan WBP an. Wiranti ke RSUD Depati Hamzah
14	14 April 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
15	28 Mei 2022	Pengawasan WBP an. Novi Apriani ke RSUD Depati Hamzah
16	12 Mei 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
17	15 Juni 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
18	24 Juni 2022	Pemeriksaan IVA test dari Puskesmas Taman sari
19	08 Juli 2022	Cek Urine Petugas dari Lapas Kanwil Babel
20	06 Juli 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
21	13 Juli 2022	Pengawasan WBP an Triani ke RSUD Depati Hamzah
22	28 Juli 2022	Pengawasan WBP an Triani ke RSUD Depati Hamzah
23	01 Agustus 2022	Kegiatan Fogging DBD dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
24	13 Agustus 2022	Sosialisasi dari Puskesmas Taman sari terkait DBD
25	13 Agustus 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas

		Taman sari
26	18 Agustus 2022	Kegiatan Vaksinasi dari Biddokkes Polda Kep. Babel
27	25 Agustus 2022	Pemeriksaan IVA test dari Puskesmas Taman sari
28	17 September 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
29	10 Oktober 2022	Cek Urine Petugas dari Lapas Kanwil Babel
30	22 Oktober 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
31	24 Oktober 2022	Pemeriksaan IVA test dari Puskesmas Taman sari
32	01 November 2022	Pengawalan WBP an. Evi dan Wiranti Apriani ke RSUD Depati Hamzah
33	14 November 2022	Pencabutan gigi dari Puskesmas Pangkalbalam
32	19 November 2022	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
33	22 November 2022	Kegiatan Vaksinasi dari Biddokkes Polda Kep. Babel

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan dan Narapidana dilaksanakan setiap hari dengan mengagendakan kegiatan pembinaan secara rutin.

Kegiatan Pembinaan Kemandirian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah WBP Ikut Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Mitra Pemberi Latihan	Jumlah Napi yang dilatih	Jumlah Napi yang bersertifikat
1	Pelatihan Tata Boga	BLK Provinsi Kep Babel	20	20
2	Pelatihan Salon dan Make Up	Ay Ching Salon	20	20
3.	Pelatihan Batk Shibori	Batik Melayu Pinang Sirih	20	20

Sasaran Program 3 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar Pelayanan Keamanandan Ketertiban di Lapas Perempuan sudah terjadipeningkatan, dengan diadakannya pengeledahan secara rutin, tes urin bagi pegawai dan WBP serta Menjalin Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum. Peningkatan yang terjadi juga dapat dilihat dari tidak adanya Pengaduan yang diterima.

Tabel 3.4
Daftar Dokumen Laporan Pengeledahan

NO	BULAN	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL	JUMLAH PENGGELEDAHAN YANG DILAKSANAKAN	KET
1	Januari	W.7.PAS.PAS.9.P R.04.01-049	04 Januari 2022	3 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-138	12 Januari 2022		-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-217	22 Januari 2022		-

2	Februari	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01- 277	11 Februari 2022	2 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01- 292	18 Februari 2022		
3	Maret	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-359	08 Maret 2022	3 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-421	19 Maret 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-422	22 Maret 2022		
4	April	W.7.PAS.PAS.9.P R.04.01-560	27 April 2022	4 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-569	21 April 2022		-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-579	14 April 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-579	14 April 2022		
5	Mei	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-672	20 Mei 2022	3 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-706	25 Mei 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-705	29 Mei 2022		
6	Juni	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-800	18 Juni 2022	3 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-785	14 Juni 2022		-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-775	10 Juni 2022		-
7	Juli	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1014	25 Juli 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K	27 Juli 2022		

		P.04.01-1016		2 kali	
8	Agustus	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1074	16 Agustus 2022	4 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1050	12 Agustus 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1079	18 Agustus 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1105	23 Agustus 2022		
9	September	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1184	08 September 2022	3 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1197	13 September 2022		-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1307	23 September 2022		
10	Oktober	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1338	17 Oktober 2022	4 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1330	10 Oktober 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1420	19 Oktober 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1425	28 Oktober 2022.		-
11	November	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1482	02 November 2022	4 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1503	10 November 2022		-
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1518	21 November 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1561	28 November 2022		

12	Desember	W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1622	03 Desember 2022	3 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1659	13 Desember 2022		
		W.7.PAS.PAS.9.K P.04.01-1694	23 Desember 2022		
JUMLAH KESELURUHAN PENNGELEDAHAN				38 kali	

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133,33 %	75%	100%	133,33 %	
2.	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	107,53 %	93%	100%	107,53 %	
3.	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104,17 %	96%	100%	104,17 %	
4.	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142,86 %	70%	100%	142,86 %	
5.	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	80%	100%	125%	
6.	Persentase tahanan/narapidana/a nak berkebutuhan	80%	100%	125%	80%	100%	125%	

	khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar						
7.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142,86 %	70%	100%	142,86 %
8.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	0%	0	25%	0%	0
9.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100%	153,85 %	65%	100%	153,85 %
10.	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102,04 %	98%	100%	102,04 %
11.	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%	80%	100%	125%
12.	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	125%	80%	100%	125%
13.	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	0	0	15%	0	0
14.	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100%	357,17 %	28%	100%	357,17 %
15.	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	144,25 %	67%	100%	144,25 %
16.	Persentase pengaduan yang	80%	100%	125%	80%	100%	125%

	ditindaklanjuti sesuai standar						
17.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,86 %	70%	100%	142,86 %
18.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	80%	100%	125%
19.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,86 %	70%	100%	142,86 %
20.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
21.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
22.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
23.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
24.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 per Desember tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran

Kode	Uraian	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Realisasi %
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	120.296.000,-	120,275,000,-	21.000,-	99,98%
5252.BDC.004	Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan	1.047.305.000, -	1,047,221,500, -	83.500,-	99,99%
5252.BDC.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	114.900.000,-	114.900.000,-	0	100%
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	74.480.000,-	74.480.000,-	0	100%
6231.EBA.956	Layanan BMN	10.320.000,-	10,320,000,-	0	100%
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	36.629.000,-	36,629,000,-	0	100%
6231.EBA.962	Layanan Umum	7.000.000,-	7.000.000,-	0	100%
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.023.962.000, -	4.012.452.074, -	508.926, -	99,99%
6231.EBB.951	Layanan Sarana Internal	150.000.000,-	149,225,156,-	774.844, -	99,48%
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	59.740.000,-	59,732,000,-	8.000,-	99,99%
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	4.200.000,-	4.200.000,-	0	82,14%
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.800.000,-	6,800,000,-	0	100%
6231.EBD.955	Layanan	4.200.000,-	4,200,000,-	0	100%

6231.EBD.961	Manajemen				
	Keuangan				
	Layanan Reformasi Kinerja	8.150.000,-	8,149,500	500,-	99,99%

Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas III Pangkalpinang yang dapat terserap dengan maksimal per Desember 2022 pada Tahun Anggaran 2022 dari Pagu Rupiah Murni : Rp 5,656,981,000,- Realisasi : **Rp 5,634,060,864,-**. Persentase Realisasi 99,59% Sisa Pagu Rp 22,920,136.-.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data kinerja anggaran yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan

Capaian Kinerja Anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan Nilai Kerja pada Smart DJA, sebagai berikut



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian IKPA tahun anggaran 2022 berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	015	013	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Nilai	100,00	82,12	100,00	100,00	100,00	99,91	100,00	100,00	98,20	100%	98,20
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,21	20,00	10,00	10,00	9,99	5,00	25,00			
					Nilai Aspek		91,06			99,98			100,00			
Disclaimer:																
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022																
Disclaimer:																
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022																

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

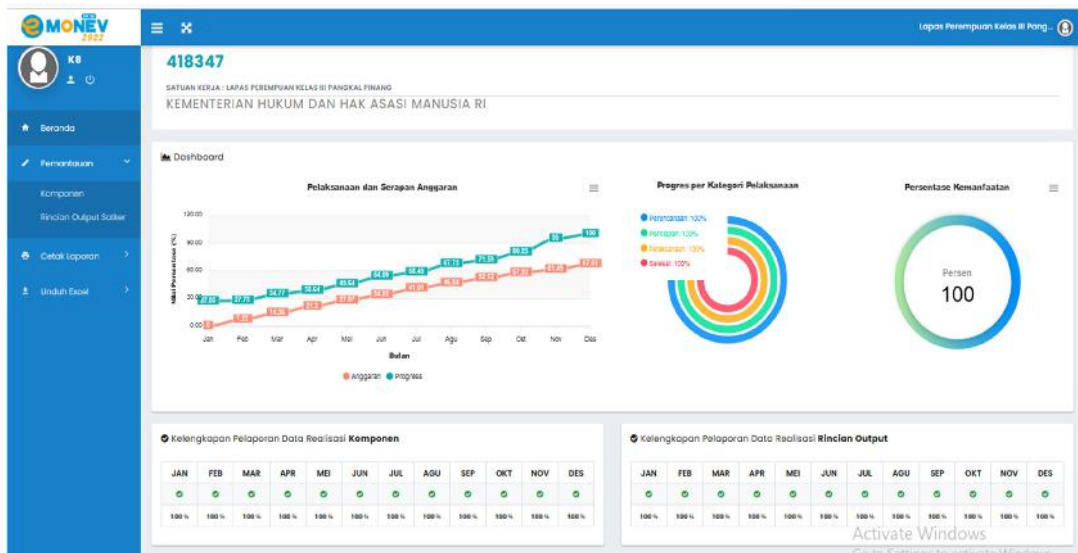
E-performance Kementerian dan Hak Asasi Manusia sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, LKjIP Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2022 35 penganggaran kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman : <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi E performance Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat 10 bulan berikutnya.

**PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2022
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUNAN KELAS III PANGKAL PINANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NO	KATEGORI	KELUFA	MULAI	WAKTU PENYELASAAN	SINERGI		REALISASI	CATATAN NUMERISASI	BOBOT	SCORE/10		
								JUMLAH	SA TUNY						
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat/Keluarga, Tergoatlah Keluarga Masyarakat dan Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan dan Terwujudnya Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat/Keluarga	1	KELUFA			21 periode Triwulan IV	191	18,75	person	18,75	100	Mulai : 100000 Mundur	0	0
								192	18,75	person	18,75	100	Mulai : 100000 Mundur		
								193	18,75	person	18,75	100	Mulai : 100000 Mundur		
								194	18,75	person	18,75	100	Mulai : 100000 Mundur		
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat/Keluarga, Tergoatlah Keluarga Masyarakat dan Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan dan Terwujudnya Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat/Keluarga	1	KELUFA			31 periode Triwulan IV	191	13,25	person	23,25	100	Mulai : 100000 Mundur	0	0
								192	13,25	person	13,25	100	Mulai : 100000 Mundur		
								193	13,25	person	23,25	100	Mulai : 100000 Mundur		
								194	13,25	person	13,25	100	Mulai : 100000 Mundur		
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat/Keluarga, Tergoatlah Keluarga Masyarakat dan Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan dan Terwujudnya Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat/Keluarga	1	KELUFA			31 periode Triwulan IV	191	30	person	30	100	Mulai : 100000 Mundur	0	0
								192	30	person	30	100	Mulai : 100000 Mundur		
								193	30	person	30	100	Mulai : 100000 Mundur		
								194	30	person	30	100	Mulai : 100000 Mundur		

2) E- Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan satker kementerian/lembaga.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan Tahun 2022. LKjIP Tahun 2022 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggung jawab Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang kurun waktu Januari s.d. November 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2016-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2022 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang bertugas dibagian pelaksana administrasi, namun pengoptimalan tugas dibantu oleh petugas pengamanan yang di BKO dari petugas jaga
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional kantor

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Agar dapat diusulkan untuk diubah jabatan dari petugas jaga menjadi pelaksana administrasi
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor.
3. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait.
4. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Pangkalpinang, 31 Desember 2022
Kepala



Hani Anggraeni
NIP 198210092000122001